

## FRAME HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) SEBAGAI KELOMPOK FUNDAMENTALIS DALAM WACANA DEMOKRASI DI MEDIA ONLINE

### FRAME OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) AS A FUNDAMENTALIS GROUP IN THE DISCOURSE OF DEMOCRACY IN ONLINE MEDIA

Karman

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Jakarta  
Badan Litbang SDM Kemenkominfo. Alamat: Jalan Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat  
Email: karman@kominform.go.id; 085865888238

Naskah diterima, 5 Juni 2015, diedit, 16 Juni 2015, disetujui 23 Juni 2015

#### Abstract

Indonesia is a democratic country. Therefore, Indonesia conducts periodic general election every five years since 1955. Indonesia has variety/diversity of culture. That one gives different attitude toward democracy both as a system or as an ideology. One of the attitude is the expression of a rejection against democracy. One of organizations/groups rejecting democracy is Hizb Tahrir Indonesia (HTI). It articulates its rejection to democracy through online media (website). This research tries to find frames on HTI's websites regarding discourse of democracy. Method of this study is qualitative-content analysis, using agenda setting theory at the second level (level frame). In looking for news, this research used key words: "pemilihan umum/general election", "demokrasi/democracy". The result finds four (4) main frames in its websites: (1) the frame of democracy as a tool of capitalism and colonialism; (2) Frame of Indonesian government as an colonialist's cat's paw; (3) frame of democracy as a shield of non-Muslims; (4). frame of democracy as a system that make people in misery. In this study, researcher doesn't dealt with interesting topics because of the limitations of the method/tool used. Therefore, for further studies, it needs to deepen this issue. Coverage of research should not be limited to only HTI but other muslim organizations.

**Keywords:** Frame; Hizbut Tahrir Indonesia; fundamentalist; discourse; democracy

#### Abstrak

Indonesia adalah negara yang demokratis. Oleh karena itu, Indonesia menyelenggarakan proses pemilihan umum sejak 1955 dan kemudian dilaksanakan secara periodik 5 (lima) tahun sekali. Kondisi Indonesia yang penuh dengan keragaman kultur melahirkan sikap yang beragam pula terhadap demokrasi, salah satunya adalah ekspresi penolakan terhadap demokrasi. Kelompok yang gencar melakukan penolakan demokrasi adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Penolakan terhadap demokrasi diartikulasikan melalui media *online*. Tulisan ini berusaha menemukan *frame-frame* yang muncul di situs HTI terkait dengan diskursus demokrasi. Metode penelitian ini adalah analisis isi kualitatif pada level kedua (*level frame*) yang mengacu pada konsep *agenda setting theory*. Dalam mencari berita, penelitian ini menggunakan kata-kata kunci: "pemilihan umum", "demokrasi". Hasil penelitian menemukan 4 (empat) *frame* utama di situs HTI, yaitu (1) *frame* demokrasi sebagai alat penjajahan kapitalisme dan kolonialisme; (2) *frame* pemerintah Indonesia sebagai antek penjajah; (3) *frame* demokrasi sebagai tameng orang nonmuslim; (4) *frame* demokrasi sebagai sistem yang menyengsarakan rakyat. Dalam penelitian ini tidak dikaji topik-topik yang sebenarnya menarik, namun, karena keterbatasan metode yang digunakan, ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, untuk kajian selanjutnya perlu dilakukan pendalaman mengenai masalah ini. cakupan juga tidak hanya dibatasi pada HTI tapi organisasi lain.

**Kata-kata Kunci:** Frame; Hizbut Tahrir Indonesia; fundamentalis; Wacana; Demokrasi

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika. Banyak para pakar ilmu politik yang merumuskan parameter sebuah negara demokratis. Robert Alan Dahl (1915–2014) -Seorang ahli ilmu politik dari Yale University- menjelaskan bahwa negara demokrasi itu memiliki 7 (tujuh) indikator, yaitu: (1) Kontrol atas keputusan-keputusan pemerintah tentang kebijakan secara konstitusional terletak pada para wakil rakyat yang terpilih; (2) para wakil rakyat yang terpilih, dipilih dan dengan damai digantikan secara teratur, adil dan melalui pemilihan bebas dimana pemaksaan cukup dibatasi; (3) Pada praktiknya, semua orang dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan; (4) Kebanyakan orang dewasa memiliki hak untuk mengejar jabatan publik, yaitu sesuatu yang dikejar oleh para kandidat dalam proses pemilu; (5) Para warga negara mendapatkan hak untuk berekspresi secara efektif, khususnya ekspresi politik termasuk mengkritik para pejabat, mengkritik tingkah laku pemerintah, politik yang berlaku, ekonomi, sistem sosial dan ideologi dominan; (6) Warga negara memiliki akses menuju sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau oleh suatu kelompok tertentu; (7) Warga negara memiliki dan secara efektif menegakkan hak untuk membentuk dan mengikuti organisasi-organisasi otonom, termasuk organisasi politik, seperti kelompok politik dan kelompok kepentingan, yang berusaha untuk memengaruhi pemerintah dengan berkompetisi dalam pemilu dan dengan tujuan-tujuan lain yang memiliki maksud damai (dalam IDI, 2009; Gaffar, 1996). Senada

dengan Dahl, Diamond dkk merumuskan indikator atau syarat demokrasi, yaitu (*pertama*) adanya Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang mempunyai kekuasaan efektif, pada jangka waktu yang reguler dan tidak melibatkan penggunaan daya paksa. *Kedua*, adanya partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara reguler dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun kelompok yang dikecualikan. *Ketiga*, adanya kebebasan sipil dan politik; kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik (Loveman, 1994; IDI, 2009). Sebagai salah bukti bahwa Indonesia negara yang menjalankan proses demokratisasi adalah dengan melaksanakan butir pertama tadi, yaitu menyelenggarakan proses pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif (DPR), anggota DPD, dan presiden. Pemilu di Indonesia itu sendiri sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan pemilu 2014. Perubahan signifikan terjadi pasca lengsernya Soeharto yang kemudian disusul gerakan reformasi 1998.

Jumlah partai politik meningkat drastis, dari tiga partai politik pada masa orde baru menjadi 141 partai seperti yang terdaftar di kementerian hukum dan HAM pada 1999 (Huda, 2013). Pada tanggal 9 April 2014 ini, partai politik yang ikut dalam pemilu kali ini sebanyak 12 partai nasional dan 3 partai lokal Aceh tersebut adalah 1). Partai Nasdem; 2). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 3). Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 4). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 5). Partai Golongan Karya (GOLKAR); 6) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); 7). Partai Demokrat; 8). Partai Amanat Nasional (PAN); 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); 10). Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); 11). Partai Damai Aceh (PDA); 12). Partai Nasional Aceh (PNA); 13). Partai Aceh (PA); 14). Partai Bulan Bintang (PBB); 15). Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Pemilihan umum dilaksanakan secara periodik 5 (lima) tahun sekali. Hal ini menjadi konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi. Di negara manapun, jika ia mau dikatakan sebagai negara demokrasi harus melakukan pemilihan umum. Bukan hanya itu, demokrasi menuntuk proses pemilihan pemimpin melalui prosedur pemilihan, misalnya untuk pemilihan gubernur, bupati/ wali kota, pemilihan kepala desa, termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan. Ini merupakan wujud konkret prinsip demokrasi "*dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*". Jadi, pemilihan umum, adalah manifestasi nyata demokrasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan politisi atau wakil yang kelak akan membuat kebijakan (*policymaking*) (lihat Wlezien dan Soroka, 2007). Prinsip awalnya lahir dari sebuah bangsa (Yunani). Kini, menjadi sistem yang mendunia. Kebenaran parikular dan parsial kelompok tertentu kini dijadikan tolak ukur kebenaran umum. Hal ini bila menunjukkan bahwa demokrasi sudah menjadi sebuah *doxa* (meminjam istilah kata Bourdieu), atau grand narasi, metanarasi, efisheme. Bangsa di dunia ia seakan-alam diwajibkan menganut demokrasi dan menerimanya secara *taken for granted*. Padahal, sebagai sebuah produk dari budaya, *milleu* tertentu, ia tidak bebas nilai. Oleh karena itu, konsep tersebut harus disesuaikan dengan kultur, logos, budaya tiap bangsa melalui proses adaptasi dan adopsi sistem kebudayaan, bukan dalam bentuk invasi. Dengan kondisi Indonesia yang penuh dengan keragaman kultur yang mencakup agama, suku melahirkan sikap yang beragam pula terhadap demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi sebagai sebuah falsafat dan prosedur mendapat penolakan.

Penolakan terhadap sistem demaokrasi di Indonesia, dilakukan salah satunya adalah oleh HTI. Penolakan HTI terhadap demokrasi berdasarkan nilai-nilai agama. Sistem ini dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Organisasi ini menyampaikan wacana penolakan melalui media partisan, bukan media *mainstream* seperti tabloid "*Media Ummat*", buletin "*Al-Islam*", majalah "*Al-Wa'ie*", dan sejumlah situs. Beberapa studi menyebutkan bahwa HTI dengan sebutan organisasi yang menyebarkan ideologi transnasional, gerakan revivalisme islam timur

tengah, gerakan radikal, organisasi antidemokrasi, organisasi ekstrimis dan sebutan lainnya. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Ken Ward (2009), berjudul “*on-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia*”, dikatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi muslim radikal (*Radical Muslim Organisation*) yang didirikan tahun 1950 oleh Taqiuddin An-Nabhani. HTI internasional mengawasi seluruh HT yang ada di dunia, termasuk HT di Indonesia. Wacananya sangat anti Barat, menolak kapitalisme, demokrasi, liberalisme, dan pluralisme. Tujuannya adalah ingin mendirikan negara Islam (*Islamic state*) dalam kesatuan sistem khilafah global (*global caliphate, muslim superstate*). HTI menolak segala bentuk kekerasan dan aksi terorisme dan menuduh Barat sebagai dalang di balik aksi teror yang ada di Indonesia. Menurut artikel berjudul “*Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia*”, HTI adalah gerakan Islam yang beroperasi di 45 negara Mohamed Nawab Mohamed Osama (2009). Strategi mobilisasi telah menghasilkan perubahan kebijakan di Indonesia. Burhanuddin Muhtadi (2009) dalam artikelnya yang berjudul “*Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia*”, menggambarkan HTI pasca jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. HTI telah mengambil kesempatan untuk menjanjikan pembentukan masyarakat yang adil di bawah kekhilafahan Islam global. Peningkatan pesat dari HTI, lebih daripada kebanyakan kelompok-kelompok Islam lainnya, telah ditekankan oleh ketidakpuasan terhadap negara. Ada persepsi masyarakat bahwa reformasi politik, ekonomi, dan hukum yang diperkenalkan di era reformasi tidak berdampak signifikan untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Ini kondisi membenarkan klaim HTI bahwa Indonesia membutuhkan sistem yang radikal dan komprehensif yang oleh HTI disebut sebagai *al-khalifah al-Islamiyyah* (kekhilafahan Islam). Menurut James Fox dalam “*Currents in contemporary Islam in Indonesia*”, mengatakan bahwa HTI adalah gerakan Islam di Indonesia yang menyerukan perbaikan, khalifah internasional, menolak nasionalisme negara bangsa. Pada artikel ini juga ditunjukkan adanya *sharing* pemikiran antara umat Islam di satu negara dan umat Islam di negara lain yang dalam penelitian ini umat Islam yang dimaksud adalah HTI. Sebagai contoh, Syaikh Abdurrahman Ad Dimasqiyahs memberikan ceramah dalam bahasa Inggris yang mungkin disampaikan di negara Inggris, lalu muncullah kemudian dalam versi bahasa Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa selama berabad-abad bahwa Indonesia memiliki hubungan sangat dekat, kuat dengan keragaman sumber-sumber idea di dunia Islam yang kemudian bergema ke dalam tanah air (lihat James Fox, 2004). Artikel lain ditulis Mohamed Nawab Mohamed Osman (2010) yang berjudul “*The Transnational Network of Hizbut Tahrir Indonesia*”. Tulisan ini mengeksplorasi jaringan regional network Hizbut Tahrir (HT) cabang Indonesia, dan bagaimana Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendukung kegiatan HT di negara lain. Artikel bertujuan untuk memahami kagitan HTI sebagai organisasi dan gerakan transnasional serta bagaimana implikasi dari kegiatan ini. proses penanaman

kemampuan anggota organisasi ini adalah melalui *usroh* dan *halaqoh* (*small Islamic study groups*). Organisasi ini melakukan penolakan melalui wacana yang disebarluaskan melalui situsnya ([hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id)). Dari studi di atas, ditunjukkan bahwa HTI itu adalah kelompok Islam revivalis atau fundamentalis. Gerakan fundamentalisme memang memiliki tipologi yang berbeda-beda, namun prinsip kelompok Islam fundamentalisme memiliki kesamaan, yaitu oposisionalisme (paham perlawanan), menolak hermeneutika, penolakan terhadap paham pluralisme dan relativisme, menolak persamaan *gender* (lihat Martin dalam Harto, 2008; Misrawi dalam Nu'ad, 2005). Secara ringkas, ciri gerakan fundamentalisme ditunjukkan dengan sikap melawan (*fight*) kelompok-kelompok yang dianggap mengancam keberadaan mereka, berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, berjuang dengan (*fight with*) nilai-nilai identitas tertentu, melawan (*fight against*) musuh-musuh dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang, serta berjuang atas nama Tuhan (*fight under*) (Taher (1998). Tulisan ini akan memaparkan *frame-frame* yang muncul di situs HTI sebagai kelompok Islam fundamentalisme terkait dengan diskursus demokrasi.

### Konsep Agenda Setting

Kajian media ini berusaha secara khusus bertujuan untuk melihat tingkat perhatian media terhadap masalah sosial yang ada. Perhatian media massa akan menentukan apa yang akan dipikirkan oleh masyarakat, baik dalam arti masyarakat sebagai *the social* maupun sebagai *the public*. Gagasan di atas mengantar kita pada salah satu kajian empiris yang dominan yang disebut *framing* dan *agenda setting*. Tradisi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana media dapat mempengaruhi sikap audiens khususnya sikap mereka terhadap isu politik yang diangkat oleh media melalui berita yang disajikan atau disiarkan (Shah *et al*, 2009). Pada halaman lain Shah mengatakan *framing* adalah proses di mana penekanan atau konstruksi pesan mempengaruhi interpretasi audiens sebagai penerima pesan (Shah *et al*, 2009). *Framing* dan *agenda setting* menduduki posisi dominan dalam penelitian komunikasi empiris. Berita media dianggap mampu membentuk kondisi respon kognitif audiens. McGuire (1968) dan beberapa pakar lain mengatakan *framing* adalah aspek atau perluasan konsep *agenda setting*. Ada juga yang mengatakan *framing* itu bagian dari *cultivation theory* (Long dan Ishak, 2013). Persepsi ini berujung pada munculnya dua pemahaman atas pendekatan komunikasi politik yang sesungguhnya tidak perlu. Kosicki dan Maher (1993) mengatakan bahwa pendapat para ahli yang mengatakan *framing* merupakan perluasan konsep *agenda setting* ditentang oleh ahli-ahli lain yang berpendapat bahwa *framing* secara konseptual dan prosedural berbeda dengan *agenda setting*. Para ahli ini mengatakan meskipun terdapat kesamaan antara keduanya (*agenda setting* dan *framing*) dalam hal kesamaan serangkaian mekanisme

psikologis, tetapi proses kognitif khususnya proses yang melatarbelakangi keduanya berbeda sekali. Yang lebih penting para penentang menemukan bahwa framing merupakan bagian dari rangkaian teori produksi sosiologi dan budaya berita. Dari perspektif ini *framing* dipahami sebagai proses konstruksi pesan dengan fokus bagaimana wartawan mengkonstruksi teks berita dan implikasi terkaitnya pada pemahaman audiens (Shah, 2009).

*Framing* menjadi kerangka teoretis untuk populer yang diterapkan dalam bidang penelitian ilmu komunikasi *research* dan varian-varian konsep ini diterapkan dalam disiplin akademik yang berbeda-beda (Buist dan Mason, 2010). EM Griffin mengatakan *framing* adalah seleksi atas atribut terbatas yang berhubungan yang dimasukkan dalam agenda media pada saat tertentu dibahas. (2012). Memframe (*to frame*) berarti memilih aspek tertentu dari realitas dan menampilkannya lebih menonjol (Enman, 1993). Sampai tahun 1990-an, hampir setiap tulisan tentang *agenda setting* masih menganggap media tidak menceritakan kepada pembaca apa *what to think*, namun secara mempesona berhasil menjelaskan kepada pembaca *what to think about*. Dengan kata lain, media membuat beberapa isu lebih menonjol dari yang lain. Pembaca atau pendengar memberikan perhatian lebih pada isu-isu tersebut dan menganggapnya lebih penting. Pada titik ini media sesungguhnya mempengaruhi apa yang dipikirkan oleh audiens (lihat Griffin, 2012). *Frame* atau *framing* dianggap memiliki peran sentral untuk memahami opini publik (dalam konteks ini opini HTI) mengenai masalah politik dan isu lainnya (McMenamin, 2012). *Agenda setting* level satu dan dua. Pada awalnya terminologi teori *agenda setting* ini lahir dari penelitian McCombs dan Shaw tahun 1968-an mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat yang mengaitkan isu prioritas media (pers) dengan isu yang menjadi perhatian publik Amerika mengatakan perhatian pers terhadap isu politik tertentu mempengaruhi evaluasi pers terhadap isu yang dianggap penting. Konjektur ini mendorong peneliti untuk mencaritahu sumber dari agenda media, kondisi yang membuat hal itu mungkin terjadi. Isu pokok dari teori agenda setting dan proses psikologi yang menjelaskan efek adalah transfer yang nyata, kemampuan media untuk menyampaikan pentingnya butir-butir sebagaimana penempatannya pada agenda media. Dengan mengusulkan penjelasan kognitif atas kemampuan media untuk membentuk agenda publik, Iyengar dan Kinder menggunakan metode-metode eksperimental untuk meningkatkan pemahaman mereka atas agenda setting dan bentuk terkait lainnya dari pengaruh media. Ini kemudian dikenal sebagai priming. Terbitnya buku kedua pakar ini merupakan kontribusi pada peralihan dari penelitian tentang efek media yang menganggap pengaruh media sebagai hasil dari interaksi dengan sistem kognitif individu. Formulasi asli dari agenda setting disebut sebagai "*first level*" agenda setting mengeksplorasi bagaimana tingkat atensi terhadap suatu isu terkait dengan menonjolnya isu tersebut di hadapan publik, tapi tidak fokus pada nuansa dari

liputan dari sebuah isu. *Framing* dan *Priming*. Para ahli sepakat dalam beberapa hal mengenai masalah framing dan priming khususnya dalam hal hubungannya dengan bidang psikologi dan sosiologi, tapi mereka berbeda dalam satu poin di mana sebagian ahli seperti Chong dan Druckman (2009) menganggap bahwa pada prinsipnya keduanya *-framing* dan *priming-* sama sehingga kedua terminologi dapat dipertukarkan (*interchangeable*).

Namun para penulis mengatakan bab ini mengakui adanya kesamaan antara *framing* dan *priming* dari segi efek kognitif media misalnya pada level dasar keduanya menggambarkan bagaimana struktur suatu stimulus dari pesan berinteraksi dengan struktur kognitif dari anggota audiens yang berakibat pada judgment selanjutnya. Shah et al mengatakan sementara efek *framing* langsung terlihat setelah terpaan pesan, sedangkan efek *priming* merupakan produk dari *recency* (kebaruan) dan *chronicity* dari terpaan pada stimuli. Dengan demikian Shah et. al., melihat framing dan *priming* berhubungan, tapi merupakan fenomena yang dapat dibedakan yaitu berasal dari pola-pola berbeda dari terpaan pesan.

Dalam era digital seperti sekarang ini, *frame* dalam kaitannya dengan penciptaan opini publik tidak hanya dilansir melalui media cetak (spanduk, selebaran, tabloid, majalah) tapi juga melalui media *online*. Dijk (2006) menjelaskan bahwa abad ke-21 merupakan era yang disebut dengan masa jaringan (*age of networks*). Transportasi informasi dan komunikasi akan menggantikan transportasi barang dan orang (Dijk, 2006). Fenomena tatanan struktur masyarakat informasi tidak bisa dipisahkan dari kehadiran internet yang dalam penelitian ini disebut dengan media *online*. Definisi secara resmi dari internet dibuat oleh Federal Networking Council di Amerika tahun 1995. Menurutinya, 'Internet' adalah: *The global information system that (i) is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons; (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and (iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein* (Lister, et.al., 2009). *Web* umumnya didefinisikan dengan tiga standar: URLs (*uniform resource locators*), HTTP (*hypertext transfer protocol*), dan HTML (*hypertext markup language*). Standar ini digunakan oleh server *www* dan *clients* untuk memberikan mekanisme sederhana untuk menempatkan (*locating*), mengakses (*accessing*), memberikan (*displaying*) informasi yang ada melalui protokol jaringan. HTTP berfungsi sebagai protokol utama yang digunakan untuk mengakses (*retrieving*) informasi melalui web (lihat Mirabito and Morgenstern, 2004). Setelah dikembangkannya web ini, terjadi perubahan sosial-budaya dan ekonomi yaitu aktivitas *online*. Fenomena ini dikenal dengan bom *dot-com*. Karena berbentuk digital, informasi dalam *online* memiliki sifat-sifat yang dapat rinci sebagai berikut: (a)

*Manipulable*. Informasi dapat diubah dan disesuaikan pada tahap penciptaan, penyimpanan, pengiriman, dan penggunaan; (b) *Networkable*. Informasi dapat dibagi-bagi (*sharing*) ke banyak orang secara serentak; (c) *Dense*. Informasi dapat disimpan dalam jumlah banyak; (d) *Compressible*. Informasi dapat dikurangi sesuai dengan yang diinginkan; (e) *Impartial*. Informasi digital yang disebarkan melalui jaringan tidak berbeda-beda, siapa yang memiliki, dan siapa yang menciptakannya (Feldman dalam Flew, 2005).

Roger (1986) menjelaskan bahwa ciri utama dari internet selain (i) interaktivitas (*interactivity*) adalah (ii) demasifikasi (*demassification*), dan (iii) *asynchronous*. Terkait dengan interaktivitas, kehadiran media baru menjadi faktor pemungkin (*enabler*) bagi warganya (*netter*) untuk berkomunikasi secara interaktif. Kemampuan sistem komunikasi baru ini (berupa komputer sebagai komponennya) memfasilitasi individu berkomunikasi hampir seperti dalam percakapan tatap muka (*face to face*). Tingkat interaktifnya mendekati level komunikasi antarpribadi sehingga para partisipannya bisa berkomunikasi secara lebih akurat, lebih efektif, dan lebih memuaskan. Internet juga bersifat demasifikasi (*demassification*), tidak bersifat massal. Suatu pesan khusus dapat dipertukarkan secara individual di antara para partisipan yang terlibat dalam jumlah besar.

Demasifikasi juga berarti kontrol atau pengendalian sistem komunikasi massa biasanya berpindah dari produsen pesan kepada konsumen pesan. Karakteristik internet yang bersifat *asynchronous* bermakna bahwa teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan mengirimkan dan menerima pesan pada waktu yang dikehendaki oleh setiap peserta (lihat Rahadjo, 2011: 3-29). Konsep paling penting dari internet adalah digitalisasi dan konvergensi (lihat Dijk, 2006; McQuail, 2010; Flew, 2005). Ciri-ciri internet yang paling banyak dikutip dalam penelitian –menurut Metzger (dalam Nabi dan Oliver, 2009: 562)- adalah interaktivitas, perbedaan isi (*diversity of content*), pengawasan khlayak dan selektivitasnya, personalisasi, konvergensi media, struktur, organisasi informasi, serta jangkauan global. Perkembangan internet ini memicu lahirnya *cyberspace*, *virtual world*, *network society*.

Internet itu sendiri adalah jaringan elektronik yang menghubungkan orang dan informasi melalui komputer, dan teknologi media digital lainnya, yang memungkinkan terjadinya komunikasi antarpribadi dan pencarian informasi. Internet merujuk kepada aspek teknis berupa infrastruktur komunikasi yang dihubungkan ke teknologi media digital lain (seperti *server*, *router*) yang terhubung melalui jaringan telekomunikasi dengan kecepatan tinggi (*high speed*), berupa konten, komunikasi, dan fasilitas berbagi informasi (*information sharing*) yang terjadi melalui jaringan ini (Flew, 2005). Keunggulan internet adalah mampu menghilangkan batas hambatan geografis, dan waktu.

## Metode Penelitian

Media yang dijadikan kajian adalah situs HTI ([hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id)) tahun 2014. Kajian media ini dilakukan dengan analisis isi kualitatif, yaitu untuk mengetahui *frame* yang muncul di situs HTI. Jadi, *agenda setting* yang dipakai dalam kajian ini adalah *agenda setting level 2*, yaitu tentang *frame* pemberitaan. Peneliti berargumen bahwa isi berita itu mengandung *frame* suatu organisasi media (lihat Bowe, 2012). Aspek yang akan diungkap mencakup topik yang muncul di situs ini. Analisis isi kualitatif yang dipakai pada kajian ini adalah analisis isi kualitatif deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana isi media (halaman *websites*). Kekurangan analisis isi ini adalah tidak menjawab pertanyaan *why*, penyebab atau alasan media memberitakan gejala sosial (dalam hal ini mengenai demokrasi). Dalam pencarian berita di situs HTI, peneliti menggunakan kata-kata kunci, yaitu: “pemilihan umum”, “demokrasi”. Peneliti menekankan waktu di sini yaitu berita yang dipublikasikan pada tahun 2014. Pada tahun itu, pemerintah Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih anggota parlemen, untuk memilih presiden dan wakil presiden RI. Berita yang dipilih untuk dianalisis tidak dibatasi pada jumlah (*quantity*), tapi berdasarkan pada aspek kualitatif berita tersebut, yang menunjukkan *frame* HTI.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Artikel/berita yang dipublikasikan di situs Hizbut Tahrir Indonesia/HTI ([hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id)) sepanjang tahun 2014 didominasi oleh berita yang merupakan liputan atau *press release* HTI di daerah-daerah. HTI pada tanggal 27 Mei–1 Juni 2014 menyelenggarakan konferensi Islam dan peradaban (KIP) di 70 kota di Indonesia. Tema besar yang diusung adalah “*Indonesia Milik Allah*” dan “*Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal*”. Tema KIP yang diusung HTI berkaitan dengan agenda besar bangsa Indonesia pada tahun 2014, yaitu pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota parlemen dan presiden periode 2014-2019. Jadi, pemerintah sebagai penyelenggara pemilu melalui komisi pemilihan umum (KPU) berusaha meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Begitu pula, partai politik melakukan kampanye untuk meningkatkan popularitasnya. Jadi, tema yang diusung oleh HTI sebagai kelompok Islam revivalis menciptakan arus berlawanan dengan program pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah berusaha mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sebaliknya, HTI mengkampanyekan paham antidemokrasi, mengajak masyarakat untuk mencampakkan demokrasi dan memperjuangkan khilafah Islamiyah. Jadi, ada dua arus wacana yang saling bertubrukan di tahun 2014, wacana demokrasi dari pemerintah dan wacana antidemokrasi dari HTI. Berikut ini tema yang ada di situs HTI. Tema tersebut terbagi menjadi lima tema, yaitu sebagai berikut:

(1) Kritik Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Demokrasi

Sebagai Sebuah Ideologi; (2) Konstruksi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Partai Politik; (3) Konstruksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Pemerintah Indonesia Sebagai Hasil Demokrasi; (4) Konstruksi HTI Terhadap Kelompok/Orang Lain; (5) Konstruksi Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Dampak Demokrasi. Berikut ini pemaparannya.

### Frame Demokrasi Sebagai Alat Penjajahan Kapitalis

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan kritik terhadap demokrasi sebagai sebuah ideologi, konsep atau nilai dari luar Islam. HTI melakukan objektivikasi

terhadap demokrasi ini dalam beberapa artikel beritanya dipublikasikan melalui halaman *websites-nya*. Artikel-artikel berita tersebut memuat kritik-kritik terhadap demokrasi sebagai sebuah ideologi terdapat pada artikel berjudul "Demokrasi Hanya untuk Company", (17 April 2014), "Kampanye Politik Mahasiswi Sumbang: Tinggalkan Demokrasi "Tegakkan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik", (17 April 2014), "Muballighah Pekanbaru Setuju Menolak Demokrasi dan Berjuang Menegakkan Khilafah" (20 April 2014), "Demokrasi Lahirkan Sistem Ekonomi Rakus dan Eksploitatif" (21 April 2014), "Demokrasi Sistem Rusak, Menghasilkan Kerusakan" (21 April 2014), "HTI Kembali Kritisi Sistem Demokrasi Indonesia", (3 Juni 2014), "Karena Demokrasi, Kaum Muslimin Dijajah" (3 Juni 2014), "Demokrasi Sistem Kufur" (11 November 2014). HTI dalam melakukan delegitimasi wacana demokrasi mengambil sudut pandang ekonomi politik global selain mengkritik demokrasi dari sudut pandang keyakinan terhadap doktrin teologis. Sebagai contoh, HTI membuat pelesetan slogan demokrasi yang

terkenal "demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat" menjadi "demokrasi itu dari *company*, oleh *company*, dan untuk *company*". Ini terlihat pada artikel yang berjudul "Demokrasi Hanya Untuk *Company*".

Artikel ini menekankan pada aspek hubungan ekonomi politik pada peristiwa pemilihan umum. Menurut HTI, untuk kesuksesan pemilu, diperlukan dana yang tidak sedikit. Calon anggota legislatif, calon wakil presiden ada yang harus menyediakan modal milyaran. Donatur (para pemilik modal) menanamkan investasi atas nama sumbangan kepada partai dan caleg/capres. Sukses tidaknya seseorang dalam pemilu ditentukan jumlah dana dan pencitraan di media massa. Susah dibedakan antara biaya politik (*politic cost*) dan politik uang (*money politic*). Peraturan yang mengatur tentang pemilu (UU No.

8 tahun 2012) melegitimasi simbiosis antara ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi dan politik dalam sistem demokrasi akan senantiasa berjalan beriringan. Politik merupakan sumber untuk menghasilkan kebijakan dan aturan. Sementara ekonomi merupakan penopang utama keberlangsungan pemerintahan. Sistem demokrasi mengharuskan siapa yang berkuasa harus mempunyai dukungan kuat termasuk dukungan finansial selain dukungan basis masa dan mesin politik partai. Sumbangan pemilik modal atau yang disebut juga "mahar politik" terdapat kesepakatan tersembunyi ("Demokrasi Hanya

Untuk *Company*", 17 April 2014). Demokrasi itu sebagai alat atau tameng kapitalis untuk melakukan perampokan kekayaan negeri. Demokrasi sistem yang gagal, rusak dan merusak. Demokrasi dinilai sebagai sistem yang bertentangan dengan Islam. Kedua sistem tersebut berbeda dari sisi dasarnya. Adapun alasan HTI menolak demokrasi karena pertimbangan keyakinan pada ajaran Islam selain alasan dampak demokrasi yang di dalamnya rawan praktik politik uang ("*Muballighah Pekanbaru Setuju Menolak Demokrasi dan Berjuang Menegakkan Khilafah*", 20 April 2014).

Demokrasi dengan alasan sistem tersebut melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang rakus dan eksploitatif. Dalam kaitannya hubungan antara demokrasi dan Islam, selain keduanya berbeda seperti, HTI juga tidak setuju dengan apa yang disebut oleh kelompok lain dengan istilah Islamisasi demokrasi. Ketidaksetujuan HTI dalam masalah ini diekspresikan dalam berita berjudul "Islamisasi Demokrasi?". Pada artikel ini, HTI mempertanyakan kemungkinan demokrasi mengalami proses islamisasi. Alasan utama penolakan HTI terhadap demokrasi adalah karena demokrasi itu sistem kufur.

Berdemokrasi berarti mengadopsi kata demokrasi yang termasuk aktivitas *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir.

Dalam demokrasi, muslim dan kafir, laki-laki dan wanita diperlakukan sama ("Islamisasi Demokrasi?", 25 April 2014). Alasan HTI tidak menerima demokrasi adalah karena demokrasi adalah istilah asing yang maknanya jelas jelas bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Demokrasi adalah jalan hidup, tujuan, idealitas dan filosofi politik orang-orang kafir. HTI kemudian mengutip penjelasan dari Duane Swank yang menyatakan bahwa demokrasi adalah jalan hidup, pandangan hidup, dan filsafat politik. Demokrasi menurut pandangan HTI

haram diadopsi, dipraktikkan, dan disebarluaskan. HTI mengatakan bahwa demokrasi adalah *thaghut* ("Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat", 23 April 2014). Ekspresi HTI menolak demokrasi diungkapkan antara lain dengan kata "sistem kufur", "najis". Kata ini (najis) populer bagi umat Islam untuk menggambarkan sesuatu haram dan menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah tertentu (wudhu, shalat, dan lain lain), dan biasanya ini adalah sesuatu yang menjijikkan, seperti kotoran. Menurut HTI, organisasi/kelompok Islam yang menerima dan berjuang dalam demokrasi mengadopsi sistem yang salah, najis, dan kufur. HTI mengungkapkan juga fakta empiris mengenai kegagalan kelompok-kelompok Islam yang berjuang dengan demokrasi seperti FIS di Aljazair

dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Jalan perjuangan yang benar menurut HTI yaitu berupa *tatsqif* (pembinaan dan kaderisasi), *tafa'ul ma'a al ummah* (berinteraksi dengan masyarakat) dengan menyampaikan Islam secara terang terangan, dan *istilam al hukmi* (penerimaan kekuasaan) dengan metode *thalabun nushrah* (meminta dukungan dari *ahlu al quwwah*).

HTI mengkritisi logika demokrasi yang menyamaratakan kualitas seseorang, tidak memandang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak

berilmu. Produk demokrasi merupakan wujud dari kejahatan korporasi oleh penyelenggara negara yang dilahirkan dari sistem sekularisme yang digunakan. Bahkan, demokrasi adalah alat untuk menjajah bangsa Indonesia. Negara yang akan membela demokrasi adalah Amerika yang memiliki kepentingan untuk melanjutkan hegemoninya, melestarikan penjajahan, mengeruk kekayaan negeri-negeri Islam ("Karena Demokrasi, Kaum Muslimin Dijajah", 3 Juni 2014). Berdemokrasi adalah pengabaian terhadap hukum Allah yang bertujuan untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan cepat. Akibatnya, sumber alam terkuras, berhutang ke negara kapitalis. HTI menilai bahwa hukum yang dibuat melalui proses demokrasi tidak akan menghasilkan keadilan dan kebenaran ("Demokrasi Sistem Kufur", 11 November 2014). Pandangan HTI terhadap eksistensi peran partai politik tidak jauh berbeda dari pandangannya terhadap demokrasi. Pandangan HTI terhadap partai politik terlihat pada berita berjudul "Demokrasi Tidak mampu Sejahterakan Rakyat", 22 April 2014; "Demokrasi: Dari Korporasi, Oleh Korporasi, 7 Juli 2014. Menurut HTI, partai politik baik parpol Islam maupun yang berhaluan nasionalis tidak akan menyejahterakan rakyat. Partai politik tersebut tergerus oleh kepentingan pragmatis ("Demokrasi Tidak mampu Sejahterakan Rakyat", 22 April 2014). HTI menyayangkan kaum muslim yang mengikuti- proses pemilihan umum 2014 bahkan kaum muslim tersebut menyeru untuk tidak golput (golongan putih, istilah untuk mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan umum). Menurut HTI, kaum muslim seharusnya menolak demokrasi. Tujuannya agar keadilan demokrasi tidak berlangsung lagi. Jadi, bukan sebaliknya: umat didorong untuk mendukung demokrasi. HTI memaparkan bagaimana demokrasi telah menciptakan keburukan, keadilan. Ia secara detil berbicara sisi gelap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Intinya menurut HTI, demokrasi telah menipu, berbohong dengan jargon kedaulatan rakyat, serta penuh kebohongan.

### **Frame Pemerintah Indonesia Sebagai Antek Penjajah**

Pemerintah Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 melakukan pemilihan umum presiden (pilpres) secara langsung sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Proses pemilihan presiden tersebut berhasil memilih pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2014-2019. Jadi, pasangan presiden dan wakil presiden merupakan hasil dari proses demokrasi, sistem dan pandangan hidup yang banyak dikritik kelompok Islam revivalis. HTI mengonstruksi pasangan presiden dan wakil presiden yang baru terpilih tersebut dengan wacana-wacana yang bersifat *delegitimate*. Konstruksi HTI terhadap pemerintah RI dapat dilihat pada artikel berjudul "Selama Menerapkan Demokrasi Kapitalisme Liberal Jokowi JK Tetap Antek Penjajah!" 29 Oktober 2014; "Ganti Demokrasi Dengan Syariah dan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik", 11 November 2014; dan "Demokrasi Sistem

Kufur", 11 November 2014. HTI mengonstruksi Jokowi JK sebagai antek penjajah karena masih menerapkan sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Sikap rakyat dianggap sebagai sebuah sikap kepura-puraan. HTI kembali menegaskan bahwa presiden baru tidak akan bisa membawa negeri menjadi lebih baik selama yang diterapkan sistem demokrasi ("Ganti Demokrasi Dengan Syariah dan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik", 11 November 2014). HTI mengajak melakukan perubahan sistem, yaitu dari sistem demokrasi kapitalisme diganti dengan sistem Islam dalam bingkai *khilafah*. Kekuasaan, pemerintah yang dihasilkan melalui proses demokrasi dikonstruksi akan melakukan kekuasaan secara ceroboh. Kecerobohan kekuasaan ini terlihat pada kebijakannya yang tidak melindungi aset alam Indonesia dari kepentingan pemilik modal, dan tidak mengelola kekuasaan dengan benar. Menurut HTI, pengelolaan kekuasaan yang benar, yaitu dengan merujuk pada syariah Islam. Selain itu, HTI mengkritik pemerintah/penguasa yang berhutang dengan cara atau aturan yang tidak benar. Pemerintah berhutang dengan cara ribawi yang menguras sumber daya alam (SDA) Indonesia. SDA Indonesia terkuras kepada pihak kapitalis. Di sisi lain, kemampuan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat semakin lemah. Pemerintah dinilai konyol dengan menerapkan demokrasi. Menurut HTI, bergantung kepada demokrasi bagaikan bergantung kepada jaring laba-laba. Artinya, sistem demokrasi itu adalah sistem yang lemah, rapuh. HTI secara tidak langsung menganjurkan untuk menyinggalkan sistem demokrasi.

### **Frame Demokrasi Sebagai Tameng Orang Nonmuslim**

Sebagai organisasi Islam revivalis yang bersifat transnational HTI memiliki pandangan tersendiri kepada orang/kelompok lain khususnya yang berbeda agama dengannya. Kelompok atau organisasi Islam dikritik oleh HTI adalah karena memiliki pandangan, sikap dalam memahami demokrasi dan kepemimpinan dalam Islam (khilafah). Sebagai contoh HTI memahami demokrasi sebagai sebuah sistem yang gagal, najis, kufur sementara itu kelompok organisasi Islam yang lain seperti NU, Muhammadiyah, dan lain lain menerima, mendukung demokrasi. Konstruksi terhadap kelompok-kelompok ini diwujudkan dalam artikel berita berjudul "Demokrasi Tidak mampu Sejahterakan Rakyat"(22 April 2014), "Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah" (7 Juli 2014), "Demokrasi: Dari Korporasi, oleh Korporasi, untuk Korporasi" (7 Juli 2014), "Demokrasi Sistem Kufur" (11 November 2014). Berikut akan digambarkan bagaimana HTI konstruksi terhadap kelompok lain yang berbeda pandangan terhadap masalah demokrasi dan khilafah. Demokrasi dalam pandangan HTI adalah tameng bagi nonmuslim untuk menguasai Islam. Ini menunjukkan bahwa HTI melihat posisi muslim dengan nonmuslim di Indonesia dalam posisi permusuhan. Pemeluk nonmuslim dianggap berkeinginan untuk menguasai orang Islam ("Demokrasi Tidak mampu Sejahterakan Rakyat", 22 April 2014). Ketua

dewan pengurus pusat (DPP) HTI menyampaikan pidato berjudul "Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah". Dalam pidato ini, ketua DPP HTI menyayangkan kelompok lain yang meragukan dan menolak khilafah. ("Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah", 7 Juli 2014).

Paragraf kutipan di atas nampaknya HTI sedang mengkritik kelompok umat Islam lain yang menerima demokrasi. Di Indonesia ada juga organisasi sosial kemasyarakatan yang menerima demokrasi atau kader-kadernya menjadi anggota partai politik, misalnya organisasi Islam Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam. Adapun partai politik kontestan pemilu yang mayoritas anggotanya orang Islam yang eksis terlibat dalam kegiatan pemilihan umum tahun 2014 adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ada Partai Persatuan Pembangunan (PBB). Alasan yang muncul untuk menerima demokrasi adalah itu dijadikan sebagai sarana perjuangan, dapat di-Islamisasi, dan sebagainya. HTI mempertanyakan alasan yang digunakan oleh kelompok umat Islam yang menerima demokrasi. Kemudian, dalam pembahasan selanjutnya, HTI menegaskan bahwa demokrasi itu bertentangan Islam. Pada posisi ini, HTI berbeda pendirian dan penafsiran dengan kelompok umat Islam yang lain. Kelompok lain yang meragukan sistem khilafah dikritik berarti telah meragukan kekuasaan Allah. Pada kesempatan pidato tersebut, di bagian akhir pidatonya, Hizbut Tahrir kembali mengajak seluruh kaum muslim untuk berjuang menegakkan khilafah. Menurut HTI, sistem demokrasi tidak perlu dibela dan dipertahankan oleh kaum Muslim. Demokrasi pasti dibela dan dipertahankan oleh Amerika Serikat dan sekutu sekutunya. Melalui demokrasi inilah mereka melanjutkan hegemoninya, melestarikan penjajahan dan mengeruk kekayaan alam negeri-negeri Islam. Demokrasi sejatinya adalah alat penjajahan. HTI mengutip ucapan George W. Bush, mantan Presiden AS, yang pernah berkata "Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi." (*Kompas*, 6/11/2004) ("Demokrasi: Dari Korporasi, oleh Korporasi, 7 Juli 2014). Setelah mengungkapkan keburukan demokrasi, HTI mengajak untuk membela Islam yaitu dengan mendirikan khilafah Islamiyah. Menurutnya, demokrasi dibangun di atas akidah sekularisme yang bertentangan dengan akidah Islam. Akidah demokrasi adalah sekularisme. Sekularisme adalah paham yang memisahkan agama dari negara, memisahkan syariah Islam dari pengaturan urusan masyarakat. Urusan masyarakat dalam sistem demokrasi diatur dengan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia dengan mengikuti kecenderungan hawa nafsu.

### **Frame Demokrasi Sebagai Sistem Yang Menyengsarakan Rakyat**

Fokus kritik HTI dalam mendelegitimasi demokrasi adalah pada dimensi dampak negatif/buruk dari

demokrasi dalam hal ekonomi dan upaya kesejahteraan rakyat yang menurut HTI mustahil bisa diperoleh dengan menerapkan sistem demokrasi. HTI juga mendelegitimasi demokrasi pada aspek dampaknya pada bidang politik. Termasuk dalam cakupan mengkritik demokrasi adalah paham yang berkembang seiring dengan proses demokratisasi yaitu paham liberalisme, sekularisme, dan kapitalisme. Jadi, berbeda dengan jamaah anshorut tauhid yang melakukan kritisisme, mendelegitimasi demokrasi atas dasar pertimbangan teologi, agama Islam. Kritik HTI terhadap demokrasi digambarkan berikut ini. HTI berpandangan, demokrasi tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. HTI mengungkapkan jumlah hutang Indonesia yang makin besar. Padahal, menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia Islam. Dengan mengatakan, "demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi terbesar di dunia Islam namun kenyataan dengan diterapkan demokrasi ini, hutang Indonesia makin besar" menunjukkan bahwa HTI menganggap demokrasi adalah sistem yang menyebabkan Indonesia berhutang ke negara lain. Dengan kata lain, antara demokrasi dengan kesejahteraan rakyat tidak ada keterkaitan satu sama lain ("Demokrasi Tidak Mampu Sejahterakan Rakyat", 22 April 2014). HTI berpandangan bahwa sistem demokrasi sendiri menjadi penyebab korupsi mustahil diberantas. Pandangan HTI seperti ini terlihat pada judul berita "Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat" (23 April 2014). Artikel berita ini mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang mustahil bisa melakukan pemberantasan korupsi seperti yang dikehendaki rakyat. Alasannya adalah demokrasi membutuhkan biaya politik yang besar. Menurut HTI, pemilihan umum 2014 akan jauh lebih korup dari pemilihan umum sebelumnya. Pada pemilihan umum tahun 2014, partai politik bukan bagaimana merumuskan program tapi bagaimana bermain politik uang. Jadi, menurut HTI, selama pemilu bagian dari demokrasi, korupsi wajar akan terus terjadi ("Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat" 23 April 2014). Demokrasi menurut HTI tidak akan mencapai tujuan apapun. Menurutnya, demokrasi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan Amerika. Jadi, jika ada aturan atau kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Amerika, pasti Amerika tidak akan pernah rela. Dalam pandangan HTI, demokrasi dapat menggiring umat Islam ke perbuatan syirik atau penyekutuan Allah karena berdemokrasi berarti manusia telah berbuat angkuh dan sombong dengan menjadi pesaing Allah dalam hal membuat aturan kehidupan manusia.

Ketika berbicara masalah kebutuhan rakyat (perumahan), seperti dalam berita berjudul "Demokrasi Kapitalisme Gagal Penuhi Perumahan Rakyat", 15 Mei 2014, HTI melihat bahwa ketimpangan antara kebutuhan dan rumah terbangun semakin membesar merupakan bukti kegagalan sistem demokrasi kapitalisme dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat. Menurut HTI, dalam Islam, tempat tinggal adalah kebutuhan pokok tiap individu/rakyat yang harus dijamin negara. Pandangan bahwa demokrasi adalah sistem yang gagal juga nampak



pada berita berjudul “Demokrasi Sengsarakan Rakyat Indonesia”, 27 Mei 2014. Pada berita tersebut, HTI mengatakan bahwa demokrasi telah gagal menciptakan stabilitas politik dan *clear government*. Faktanya, demokrasi lebih mementingkan para kapitalis dan investor politik dari pada masyarakat. Pemerintah eksekutif dan legislatif telah melakukan persekongkolan hanya untuk melanggengkan kekuasaannya saja tanpa memikirkan kepentingan masyarakat.

HTI mengkritik bahwa di Indonesia terjadi paradoks. Kekayaan alam luar biasa melimpah tetapi rakyatnya hidup miskin dan terbelakang. Ini terjadi karena penerapan sistem demokrasi. HTI juga mengaitkan demokrasi dengan dekadensi atau kerusakan moral masyarakat. Menurunnya, demokrasi adalah sistem zalim buatan manusia yang tidak akan membawa kesejahteraan untuk rakyat, bahkan demokrasi tidak akan membawa perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Demokrasi yang mencampakkan hukum-hukum Allah telah membawa kerusakan. Moral dan akhlak sangat rusak. Pornografi, zina, merebak di mana-mana. Bahkan, saat ini ditemukan ayah kandung memperkosa anaknya sendiri (“Indonesia Milik Allah Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah”, 28 Mei 2014).

Penolakan HTI terhadap demokrasi juga berdasarkan pertimbangan pemahaman mereka atas doktrin agama. Dalam perspektif HTI, demokrasi itu adalah sistem kufur, tidak bersumber dari Allah. Pandangan HTI seperti ini dinyatakan dalam artikel berjudul “Telanjangi Demokrasi”, 30 Mei 2014. Selain karena alasan yang bersifat ideologis berbasis pada pemahaman terhadap agama Islam tadi, HTI menolak demokrasi juga karena sistem ini diyakini tidak mampu menyejahterakan rakyat, yang sejahtera justru hanya penguasa dan pengusaha. Karena pertimbangan ini, produk demokrasi tidak akan menyejahterakan rakyat. Terkait dengan pesta demokrasi atau pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Indonesia tahun 2014, HTI memandang pemilu tersebut tidak akan bisa menyejahterakan rakyat Indonesia.

Prediksi bahwa pemilihan umum tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan rakyat didasari oleh cara pandang HTI yang menilai ada perselingkuhan antara pengusaha dan penguasa. Menurutnya, kebijakan penguasa selalu dipengaruhi para pengusaha karena para penguasa saat mengikuti kompetisi pada pemilihan umum menduduki kursinya selalu dimodali pengusaha. Sehingga kebijakan penguasa selalu mengikuti arahan orang yang memiliki uang. Ditambah lagi dalam sistem demokrasi, kebijakan selalu diambil berdasarkan suara terbanyak. Menurut HTI, meskipun aturan itu akan merugikan rakyat, aturan tersebut ditetapkan menjadi undang-undang karena disetujui oleh mayoritas anggota legislatif. Demokrasi gagal menjadikan Indonesia menjadi negara yang baik dan sejahtera. Indonesia malah menjadi negara yang rusak (“Telanjangi Demokrasi”, 30 Mei 2014). Dalam berita “HTI Seru Warga Jakarta Campakkan Demokrasi dan Ekonomi Liberal”, 31 Mei 2014, HTI mengajak untuk

mencampakkan demokrasi dan sistem ekonomi liberal karena sistem ini merupakan sistem kufur yang lahir dari sistem kapitalisme. Kekufuran sistem demokrasi karena ia menempatkan agama hanya pada ranah privat. Dalam artikel berjudul “Demokrasi Bertentangan dengan Akidah Mayoritas Rakyat Indonesia”, 31 Mei 2014, HTI juga membeberkan kerusakan demokrasi. Ia menyebabkan korupsi, melahirkan undang-undang yang lahir membela cukong dan kepentingan korporasi milik kapitalis. HTI pada artikel berita ini juga memerinci kerusakan akibat demokrasi yaitu: 1) Yang penting kuantitas bukan kualitas. Dalam demokrasi, suara seorang professor sama dengan suara seorang preman. Suara seorang artis yang tidak mengerti politik dinilai sama dengan suara seorang politisi. Suara seorang yang memilih dengan analisa sama dengan suara orang yang dibayar, sama-sama dihitung satu. Demokrasi hanya menghitung jumlah, bukan kualitas; 2) Kedaulatan semu. Hakikatnya apa yang terjadi di parlemen bukanlah mewakili suara rakyat, tetapi mewakili segelintir orang yang ‘berkepentingan’; 3) Suara mayoritas. Demokrasi mengagungkan pendapat mayoritas. Suara mayoritas adalah kebenaran dalam klaim demokrasi; 4) Mahal dan menyuburkan korupsi. Wajar kasus korupsi terus merebak karena partai politik dan politisi memerlukan dana sangat besar untuk modal pemilihan umum. Untuk mengembalikan biaya politik diperoleh dari mengutip anggaran proyek, jual beli kebijakan diantaranya mengeluarkan perizinan atau konsensi dengan imbalan sejumlah uang dari penerima izin atau konsensi tersebut, menggelembungkan anggaran belanja; 5) Hanya untuk korporasi. Partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana besar. Hal ini tertanggulangi bagi yang tidak dan kurang memiliki modal dari pengusaha dan korporasi/perusahaan. Tak heran, kebijakan kebijakan memihak kepentingan para pengusaha dan korporasi/perusahaan; 6) Alat penjajahan. Demokrasi diusung oleh negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya dalam rangka melestarikan penjajahan dan mengeruk kekayaan alam negeri-negeri Islam. Demokrasi sejatinya alat penjajahan. Dalam berita “Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal”, 31 Mei 2014, HTI menyatakan bahwa anggota parlemen yang notabene adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, justru banyak sekali melahirkan peraturan perundangan yang merugikan rakyat, misalnya UU Sumber Daya Air (SDA), UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS, UU Penanaman Modal Asing (PMA), UU Migas, UU Minerba, UU Ketenagalistrikan, UU Sisdiknas, dan lain lain. Juga sangat banyak kebijakan pemerintah, yang mestinya melayani rakyat, justru menunjukkan keberpihakan bukan kepada rakyat, tetapi keberpihakan penguasa kepada pemodal, kapitalis, pengusaha. Atas nama demokrasi, rakyat dipaksa untuk mengikuti semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik penguasa, meski semua itu justru merugikan rakyat, bangsa, dan negara.

Demokrasi dalam pandangan HTI bukan menciptakan kondisi yang lebih baik tapi menciptakan

kondisi yang buruk karena terbangunnya sistem korporasi. HTI mengusulkan untuk mengadopsi sistem pemerintah khilafah. Penguasa atau pemerintah dikonstruksi sebagai aktor yang menjarah kekayaan alam Indonesia sebagai konsekuensi penerapan sistem demokrasi. Persekutuaan antara pengusaha dan penguasa semakin menggila dan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia. Indonesia dalam konstruksi berita ini dikatakan melakukan arahan dan kebijakan Amerika. Contoh dari ini adalah ide privatisasi, pengurangan subsidi. Poin artikel ini adalah demokrasi tidak dijadikan pandangan hidup dan asas bagi konstitusi Indonesia. HTI kembali menekankan bahwa demokrasi adalah ideologi kufur. Demokrasi juga dikonstruksi sebagai penyebab yang menjadikan Indonesia tetap dalam posisi belum merdeka sepenuhnya. Demokrasi juga dianggap telah mengubah negara Indonesia yang makmur dan kaya sumber daya alamnya menjadi negeri yang tidak pernah berhasil merdeka 100 persen dan mandiri. HTI melihat bahwa Indonesia masih dalam kondisi terjajah bukan dalam arti secara fisik tetapi secara ekonomi. Keterjajahan bangsa Indonesia ini karena dominasi negara Barat.

Atas nama demokrasi, negara diarahkan oleh kepentingan modal (kaum kapitalis). Oleh karena itu, pemimpin dalam sistem demokrasi sejatinya menjalankan roda pemerintahan bukanlah berdasar keberpihakan rakyat, tetapi untuk kepentingan para elit dan kroni yang berkuasa, termasuk kepentingan pemilik modal ("Sulit Berharap kepada Pemimpin Dari Sistem Demokrasi", 3 Juni 2014). Sementara itu, ideologi kapitalisme sekular menihilkan peran agama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis ideologi kapitalisme sekuler melalui modus sistem demokrasi juga menjadikan pemimpinnya abai terhadap nilai-nilai spiritual. Orientasi penyelenggaraan pemerintahan semata-mata bertumpu pada pragmatisme dan keuntungan materialistik. Akibatnya, lahirlah sosok pemimpin yang tidak memedulikan agama sebagai tolok ukur tatkala menyelenggarakan roda pemerintahan.

Alasan teologis HTI menolak demokrasi karena demokrasi bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Pada aspek sosial ekonomi, demokrasi menyebabkan munculnya kebijakan yang merugikan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan para kapitalis asing untuk menjarah sumber daya alam Indonesia. Hal ini karena sejak awal demokrasi merupakan sistem politik yang hanya menguntungkan para pemilik modal saja. Demokrasi yang dikenal sebagai sistem dari, oleh, dan untuk rakyat adalah dusta karena sebenarnya demokrasi itu adalah sistem dari, oleh, dan untuk korporasi. Gagasan tersebut terlihat pada artikel berita berjudul "Warga Garut Tolak Demokrasi dan Ekonomi Liberal, Serukan Khilafah", tanggal 3 Juni 2014. Pada berita ini juga dikatakan bahwa ekonomi liberal merupakan pangkal masalah berbagai macam carut marut ekonomi bangsa. Penjarahan kekayaan alam oleh para kapitalis asing, kemiskinan, terlantarnya kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan adalah buah dari diterapkannya sistem ekonomi liberal

karena sistem ini mengharuskan negara untuk tidak berperan dalam memelihara dan melayani kebutuhan masyarakat. Sebagai gantinya, peran tersebut diserahkan kepada swasta dalam bentuk hubungan bisnis semata. Dalam *closing statement* artikel ini, HTI menegaskan untuk kembali ke sistem khilafah. Pada artikel berjudul "Mafia Minyak Bukti Politik Transaksional Demokrasi", 16 Juni 2014, HTI menanggapi isu tentang mafia minyak. Menurutnya, keberadaan mafia minyak merupakan konsekuensi logis dari munculnya pejabat karena *cost* atau biaya politiknya yang besar. Jadi, mafia minyak hadir sebagai mekanisme mengembalikan modal politik (uang) yang telah dikeluarkan dan untuk mempersiapkan modal pemilihan umum berikutnya. Menurut artikel ini, walau dikedam, politik uang tidak bisa diberantas. Sebab ia dilegalkan dalam demokrasi. Para politisi menyebutkan sebagai biaya politik yang harus dikeluarkan untuk memaparkan visi dan misi partai beserta figurinya. Jadi, praktik mafia-mafia yang merugikan bangsa pasti akan muncul, baik secara legal maupun ilegal. Menurut HTI "Mafia tersebut dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri, yakni demokrasi". Solusi usulan HTI adalah dengan menyingkalkan sistem demokrasi.

Ketika berbicara masalah kehidupan keluarga, seperti dalam artikel berjudul "Kerusakan Keluarga Buah Pahit Demokrasi", 17 Juni 2014, HTI juga melihat demokrasi telah menyebabkan permasalahan dalam keluarga. Munculnya masalah ini karena manusia dalam demokrasi diposisikan sebagai pembuat hukum/ aturan yang berpihak pada kelompok kepentingan tertentu ("Kerusakan Keluarga Buah Pahit Demokrasi", 17 Juni 2014). Selain menyebabkan masalah dalam keluarga dan ekonomi, HTI juga mengonstruksi bahwa demokrasi menjadi penghalang orang untuk bertakwa. Konteks waktu dipublikasikannya artikel yang berjudul "Demokrasi Halangi Pengamalan Takwa" ini adalah konteks bulan puasa (bulan Ramadhan) yang bertujuan untuk menjadikan umat Islam bertakwa. Menurut HTI, manusia yang bertakwa tidak bisa diperoleh bila masih mengamalkan demokrasi. Menurut HTI, pengamalan demokrasi setidaknya menghalangi salah satu dari syarat ketakwaan yaitu mengamalkan hukum-hukum Al Quran dan Hadits, ijma shahabat dan qiyas. Jadi, menurut HTI tidak bisa dikatakan takwa bila tidak mau menjalankan syariat Islam. Menurut HTI, mekanisme penerapan hukum Allah dalam level negara adalah dengan langsung menerapkannya tanpa perlu persetujuan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjelang pemilihan umum presiden RI pada 9 Juli 2014, HTI memuat secara lengkap isi pidato ketua Dewan Pengurus Pusat HTI. Pidato tersebut disampaikan tanggal 7 Juli 2014 (2 hari sebelum pemilihan presiden/pilpres 2014), yaitu pada acara konferensi Islam dan peradaban. Judul pidatonya adalah "Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah". Artikel itu menyampaikan bahwa demokrasi tidak bisa membawa kondisi Indonesia lebih baik. Sebaliknya, demokrasi menjadikan Indonesia bobrok dan rusak. Politik Indonesia

sudah melaksanakan demokrasi dalam berbagai bentuk, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi liberal lagi. Namun, sistem demokrasi tersebut tidak bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Indonesia gagal menjadi negara yang sejahtera. Sebaliknya, demokrasi menjadi sumber masalah. ("Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah", 7 Juli 2014). Setelah menunjukkan sisi buruk demokrasi, pada pidato ketua DPP HTI ini disampaikan konsep Islam dan ajakan/seruan untuk kembali ke sistem Islam seperti yang dipahami oleh HTI, atau yang mereka gambarkan dengan istilah khilafah Islamiyyah. HTI juga menekankan bahwa demokrasi yang menciptakan kesejahteraan adalah sebagai kebohongan. Demokrasi justru menciptakan kesengsaraan bagi rakyat melalui produk hukum maupun kebijakannya.

Proses demokratisasi yang ada di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana pemilihan kepemimpinan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Wujudnya adalah pemilihan umum (untuk memilih presiden dan wakil presiden) dan pemilihan kepala daerah untuk memilih paket pasangan gubernur wakil gubernur, bupati/walikota—wakil bupati/walikota.

Dalam melihat perubahan pemilihan pemimpin ini, HTI bersifat meremehkan (*underestimate*) dan memberikan vonis bahwa sistem apapun yang dipakai akan melahirkan politisi korup. Ini terlihat pada berita berjudul "Model Pemilu Apapun Dalam Demokrasi Pasti Menyengsarakan Masyarakat", 22 September 2014. Artikel ini banyak menunjukkan sikap HTI terkait dengan polemik antara pemilihan kepala daerah secara langsung dan kepala daerah yang dipilih melalui dewan perwakilan rakyat yang pada September 2014 menjadi perdebatan publik. Menurut HTI, kedua model ini sama-sama menghasilkan politisi korup. Di dalamnya tetap akan ada praktik

perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Akhir paragraf dibuatlah pernyataan (*statement*) "sistem pemilu dalam demokrasi pasti menghasilkan politisi korup".

Dalam artikel ini, HTI mengutip data kementerian dalam negeri (Kemendagri) tentang pejabat yang tersangkut korupsi. Kemendagri mencatat hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus praktik korupsi. Menurut HTI, ini tak bisa dipungkiri karena logika pejabat ketika menjabat adalah untuk mengembalikan modal dan keuntungan. Praktik semua ini terjadi karena memang diharamkan oleh sistem demokrasi. Pemilu langsung dan pemilu tidak langsung yang dipilih via DPRD sama-sama buruk. Sama-sama melanggar politik uang, transaksional, selingkuh antara penguasa & pengusaha, dan negara korporasi. Setelah mengungkapkan praktik buruk dari sistem demokrasi, HTI mengungkapkan sisi baik dari praktik pemilihan dalam sistem Islam. Islam mensyaratkan dua hal dalam kepemimpinan, yakni terpilihnya pribadi yang shalih dan diterapkannya sistem Islam dalam seluruh aspek kehidupan yang akan menjamin kesejahteraan dan terpenuhinya seluruh

kebutuhan pokok per individu masyarakat. Dalam sistem Islam, orang-orang yang terkategori koruptor, preman, perampok, komprador tidak ada celah sedikit pun untuk hanya sekedar mendaftar, apalagi terpilih menjadi penguasa. Sudah tertutup sejak awal oleh syariat Islam. Setiap penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam bingkai khilafah yang sudah terbukti selama 14 abad mampu menyejahterakan umat manusia. Bukan hanya umat Islam tapi juga umat lain tanpa terkecuali. Akhir artikel ini berisi ajakan untuk berjuang menegakkan syariat Islam dalam bingkai khilafah. Pada berita berjudul "Kebenaran dan Kekuasaan Dalam Demokrasi", HTI mengkritisi paham demokrasi yang berarti pengabaian terhadap hukum Allah untuk tujuan mendapatkan uang atau kekuasaan dengan cepat. Akibatnya, sumber alam terkuras, berhutang ke negara kapitalis dengan sistem ribawi. HTI menilai bahwa hukum yang dibuat melalui proses demokrasi tidak akan menghasilkan keadilan dan kebenaran.

Dari pandangan HTI mengenai nilai-nilai demokrasi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan HTI menolak sistem demokrasi. HTI menolak Demokrasi karena dua alasan yaitu (*pertama*) alasan yang bersifat sosial budaya dan (*kedua*) alasan atas dasar pertimbangan pemahaman atas agama. Secara sosial budaya, HTI menolak demokrasi karena ia berpandangan bahwa demokrasi tidak menciptakan kesejahteraan; yang sejahtera justru hanya penguasa dan pengusaha. Demokrasi menjadi penyebab Indonesia berhutang pada asing. Demokrasi menjadi alat penguasa dan pengusaha untuk menguras kekayaan alam negeri melindungi kepentingan Amerika. Demokrasi lahir dari ideologi kapitalis yang kufur. Demokrasi penyebab korupsi, berorientasi pada korporasi. Dengan demokrasi, kemaksiatan akan menjadi dilema, seperti menutup lokalisasi menjadi dilema, karena ada isu HAM. Demokrasi juga dinilai melahirkan pandangan yang permisif, memecah belah umat. Ideologi demokrasi lahir dari sistem kapitalisme. Adapun alasan teologis HTI menolak demokrasi adalah karena demokrasi menggiring ke perbuatan syirik, yaitu mengambil hak Allah sebagai pembuat aturan hukum; pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam. Dengan demikian, demokrasi bertentangan dengan akidah mayoritas penduduk, sistem demokrasi juga menjadikan pemimpinnya abai terhadap nilai-nilai spiritual. Dalam kaitannya dengan ibadah yang bertujuan mencetak menjadi orang yang bertakwa seperti ibadah puasa, itu -menurut HTI- tidak bisa dicapai kalau negara masih menerapkan sistem demokrasi. Pengamalan demokrasi setidaknya menghalangi salah satu dari syarat ketakwaan yaitu mengamalkan hukum-hukum Al Quran

dan Hadits, ijma shahabat dan qiyas. Ideologi demokrasi hanya membatasi agama hanya pada urusan *private* atau personal. Demokrasi memungkinkan manusia membuat undang-undang dengan hawa nafsu dan demokrasi memecahbelah umat Islam. Bahasa yang digunakan yang mendelegitimasi wacana demokrasi adalah dengan mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem haram,

sistem *najis li dzatihi*, sistem kufur, *tasyabuh bil kuffar* (mengikuti cara orang kafir), demokrasi memiliki cacat bawaan, demokrasi sistem rusak dan merusak, demokrasi lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan, kemungkaran dan kezaliman. Demokrasi memberi jalan lahirnya pemimpin boneka asing, demokrasi biang korupsu.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Tema tersebut terbagi menjadi lima tema, yaitu sebagai berikut: (1) frame demokrasi sebagai alat penjajahan kapitalis; (2) frame pemerintah Indonesia sebagai antek penjajah; (3) frame demokrasi sebagai tameng orang nonmuslim; (4) frame demokrasi sebagai sistem yang menyengsarakan rakyat. Berikut ini pemaparannya. Terkait dengan frame demokrasi sebagai alat penjajahan kapitalis dan kolonialisme, HTI, melihat demokrasi sebagai sebuah ideologi, konsep atau nilai dari luar Islam. Pemilu menciptakan simbiosis antara ekonomi dan politik, antara pengusaha dan penguasa. Demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan Islam. Demokrasi dengan alasan sistem tersebut melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang rakus dan eksploitatif. HTI juga tidak setuju dengan islamisasi demokrasi. Demokrasi adalah jalan hidup, tujuan, idealitas dan filosofi politik orang-orang kafir. Ekspresi penolakan diungkapkan dengan kata "sistem kufur", "najis". Demokrasi dikritik karena menyamaratakan kualitas seseorang, tidak memandang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Produk demokrasi merupakan wujud dari kejahatan korporasi oleh penyelenggara negara yang dilahirkan dari sistem sekularisme yang digunakan. Demokrasi adalah alat untuk menjajah bangsa Indonesia. Terkait dengan partai politik, HTI menyayangkan kaum muslim yang mengikuti proses pemilihan umum 2014 bahkan kaum muslim tersebut menyeru untuk tidak golput. Menurut HTI, kaum muslim seharusnya menolak demokrasi. Tujuannya agar kezaliman demokrasi tidak berlangsung lagi.

Adapun *frame* pemerintah Indonesia sebagai antek penjajah, HTI mengonstruksi Jokowi JK sebagai antek penjajah karena masih menerapkan sistem demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme liberal. Sikap merakyat dianggap sebagai sebuah sikap kepura-puraan. Presiden baru tidak akan bisa membawa negeri menjadi lebih baik selama yang diterapkan sistem demokrasi. HTI mengajak melakukan perubahan sistem, yaitu dari sistem demokrasi kapitalisme diganti dengan sistem Islam dalam bingkai *khilafah*. Pemerintah dinilai konyol dengan menerapkan demokrasi yang dianggap seperti jaring laba-laba. Terkait dengan *frame* demokrasi sebagai tameng orang nonmuslim, demokrasi dalam pandangan HTI adalah tameng bagi nonmuslim untuk menguasai Islam. HTI melihat posisi muslim dengan nonmuslim di Indonesia dalam posisi permusuhan. Nonmuslim dianggap berkeinginan untuk menguasai orang Islam. HTI mengkritik kelompok umat

Islam lain yang menerima demokrasi (Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam). HTI mempertanyakan alasan yang digunakan oleh kelompok umat Islam yang menerima demokrasi. Terkait dengan *frame* demokrasi sebagai sistem yang menyengsarakan rakyat, menurut HTI, demokrasi mustahil bisa menciptakan kesejahteraan rakyat. Termasuk dalam kategori dampak demokrasi adalah dampak dari paham yang lahir dalam demokrasi yaitu liberalisme, sekularisme, dan kapitalisme. Demokrasi adalah sistem yang menyebabkan Indonesia berhutang ke negara lain. Demokrasi menjadi penyebab korupsi mustahil diberantas. HTI mengkritik bahwa di Indonesia terjadi paradoks. Kekayaan alam luar biasa melimpah tetapi rakyatnya hidup miskin dan terbelakang. Demokrasi menyebabkan kerusakan moral masyarakat. Dampak buruk kerusakan akibat demokrasi yaitu: (1) mementingkan kuantitas bukan kualitas; (2) kedaulatan yang dibangun sistem demokrasi semu; (3) mengutamakan suara mayoritas; (4) demokrasi mahal dan menyuburkan korupsi; (5) demokrasi menguntungkan korporasi; (6) demokrasi adalah alat penjajahan. Atas nama demokrasi, negara diarahkan oleh kepentingan modal (kaum kapitalis). Oleh karena itu, pemimpin dalam sistem demokrasi sejatinya menjalankan roda pemerintahan bukanlah berdasar keberpihakan rakyat, tetapi untuk kepentingan para elit dan kroni yang berkuasa, termasuk kepentingan pemilik modal.

### Rekomendasi

Kelemahan studi ini mampu mengungkapkan *frame-frame* yang ada di situs HTI. Namun, karena keterbatasan metode (*tools*), penelitian ini tidak bisa membahas *frame-frame* yang muncul tersebut. Kelemahan penelitian ini diharapkan dipenuhi dengan kajian berikutnya (*further research*). Isu-isu yang muncul di situs HTI ini bisa digali dengan pendekatan (*approach*), dan metode yang berbeda.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih, kepada mitra bestari yang bersedia mereview artikel saya ini dan juga kepada redaksi dan semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan atas terbitnya artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Bowe, Brian J., Oshita, Tsuyoshi., Terracina-Hartman, Carol., Chao, Wen-Chi. "Framing of climate change in newspaper coverage of the East Anglia e-mail scandal", *Public Understanding of Science*, 2012: 0(0) 1 -13. DOI: 10.1177/0963662512449949
- Buist, Ernest A., Mason, Daniel S. "Newspaper Framing and Stadium Subsidization", *American Behavioral Scientist*, 2010, 53(10) 1492 -1510. SAGE Publications. DOI: 10.1177/0002764210368081.

- Entman RM. "Framing: toward clarification of a fractured paradigm", *Journal Commun.* 1993: 43 (4): 51-59.
- Fong, Yang L., Ishak, Md Sidin Ahmad. "Framing interethnic conflict in Malaysia: A comparative analysis of newspapers coverage on the keris polemics", *Ethnicities*, 2013, 0(0) 1-27. SAGE Publications. DOI: 10.1177/1468796813482310.
- Fox, James. (2004). "Currents in contemporary Islam in Indonesia". Retrieved on April 15 2014. Source: <https://digitalcollections.anu.edu.au/handle/1885/42039>.
- Loveman, Brian, "Protected Democracies and Military Guardianship: Political Transitions in Latin America", in *the Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 1994 36(2), pp. 105-189.
- McMenamin, Iain., Flynn, Roderick., O'Malley, Eoin., Rafter, Kevin. "Commercialism and Election Framing: A Content Analysis of Twelve Newspapers in the 2011 Irish General Election", *The International Journal of Press/Politics*, 2012, 18 (2) 167 -187. SAGE Publication. DOI: 10.1177/1940161212468031
- Muhtadi, Burhanuddin. (2009). "Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia", *Asian Journal of Social Science*. Volume 37, Issue 4, pp.623-645.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. (2010). "The Transnational Network of Indonesia", *South East Asia Research*, Volume 18, Number 4, December, pp. 735-755 (21).
- Ward, Ken. "Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia". *Australian Journal of International Affairs* Vol. 63, No. 2, pp. 149164, June 2009.
- Wlezien, C., and S. N. Soroka. 2007. "The Relationship between Public Opinion and Policy." In *Oxford Handbook of Political Behavior*, ed. R. J. Dalton and H.-D. Klingemann, 799-817. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Buku**
- Dijk, Jan A.G.M Van. (2006). *The Network Society: Social Aspects of New Media*, 2<sup>nd</sup>. London, Thousand Oaks-CA., New Delhi: Sage Publications, Inc.
- Flew, Terry. (2005). *New Media, and Introduction*, 2<sup>nd</sup> edition. UK: Oxford University Press.
- Gaffar, Afan. (1996). *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Griffin, EM. (2012). *A First Look At Communication Theory*. Eighth Edition. 2012. McGraw Hill, New York.
- Harto, Kasinyo. (2008). *Islam Fundamentalists di Perguruan Tinggi Umum, Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*. Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama.
- Huda, Yasrul. (2013). *Contesting sharia: state law, decentralization and Minangkabau custom*. Dissertation Leiden university.
- Lister, Martin., et.al. (2009). *New Media: A Critical Introduction, Second Edition*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- McQuail, Denis. (2010). *McQuail's Mass communication theory, 6th edition*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Ltd.
- Metzger, Miriam J. The Study Of Media Effects In The Era of Internet Communication in Nabi, Robin L., Oliver, Mary Beth (eds). (2009). *The SAGE Handbook of Media Processes and Effects*. London, Thousand Oaks-CA., New Delhi: Sage Publications, Inc.
- Mirabito, Michael M. A., Morgenstern, Barbara L. (2004). *The New Communications Technologies: Applications, Policy, and Impact. Fifth Edition*. Oxford, UK: Elsevier Inc.
- Nu'ad, Ismatillah A. (2005). *Fundamentalisme Progresif, Era Baru Dunia Islam*. Jakarta: Panta Rei.
- Shah, Dhavan V., Douglas M McLeod, Melissa R. Gotlieb, dan Nam-Jin Lee dalam Nabi, Robion L. dan Mary Beth Oliver dalam *Framing and Agenda Setting, The Handbook of Media Processes and Effects*. 2009. SAGE Publications, Thousand Oaks, California. Taher, Tarmizi. (1998). *Radikalisme Agama*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), IAIN Jakarta.
- UNDP, BPS, BAPPENAS, et al. (2009). *Indikator Demokrasi 2009*. UNDP: Jakarta.
- Artikel di Websites HTI**
- "Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah", tanggal 7 Jul 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Demokrasi Lahirkan Sistem Ekonomi Rakus dan Eksploitatif", tanggal 21 Apr 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Demokrasi Sistem Kufur", tanggal 11 Nov 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Demokrasi Sistem Rusak, Menghasilkan Kerusakan", tanggal 21 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Demokrasi: Dari Korporasi, oleh Korporasi, untuk Korporasi", 7 Juli 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "HTI Kembali Kritis Sistem Demokrasi Indonesia", tanggal 3 Juni 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Kampanye Politik Mahasiswi Sumbar: Tinggalkan Demokrasi "Tegakkan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik", tanggal 17 Apr il2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Karena Demokrasi, Kaum Muslimin Dijajah", tanggal 3 Juni 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.
- "Muballighah Pekanbaru Setuju Menolak Demokrasi dan Berjuang Menegakkan Khilafah", tanggal 20 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.

- "Demokrasi Bertentangan dengan Akidah Mayoritas Rakyat Indonesia", tanggal 31 Mei 2014,
- "Demokrasi Hanya untuk Company", tanggal 17 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.
- "Demokrasi Sistem Kufur", tanggal 11 November 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.
- "Demokrasi Tidak mampu Sejahterakan Rakyat", tanggal 22 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.
- "Ganti Demokrasi Dengan Syariah dan Khilafah Untuk Indonesia Lebih Baik", tanggal 11 November 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.
- "Indonesia Milik Allah Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah", tanggal 28 Mei 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.
- "Islamisasi Demokrasi?", tanggal 25 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2014.
- "Kerusakan Keluarga Buah Pahit Demokrasi", tanggal 17 Juni 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Mafia Minyak Bukti Politik Transaksional Demokrasi", tanggal 16 Juni 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat", tanggal 23 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat", tanggal 23 April 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Saatnya Khilafah Menggantikan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal", tanggal 31 Mei 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Selama Menerapkan Demokrasi Kapitalisme Liberal Jokowi JK Tetap Antek Penjajah!", tanggal 29 Oktober 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Telanjangi Demokrasi", tanggal 30 Mei 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 27 Desember 2014.
- "Warga Garut Tolak Demokrasi dan Ekonomi Liberal, Serukan Khilafah", tanggal 3 Juni 2014, tersedia di [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id), diakses tanggal 28 Desember 2014.

